RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI		TIME LINE RENAKSI (TRIWULAN I/ II / III / IV)
A. BAGIAN UMUM DAN TU								
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	16.379.415.000	1 Perencanaan, Organisasi dan Pelaporan	- Menyusun Rencana Strategis Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	I - II
							- Melaksanakan Evaluasi Mandiri AKIP oleh Tim Penilai Mandiri Kantor Wilayah	I, II, III, dan IV
							- Monitoring dan Evaluasi atas Capaian Kinerja dan Anggaran (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	I, II, III, dan IV
							- Melakukan Monitoring Alokasi Anggaran sesuai dengan besaran SBKU dan SBKK yang ditetapkan	I
							- Pelaksanaan koordinasi dan Konsultasi Kinerja	I, II, III, dan IV
							- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran	I, II, III, dan IV
							- Melaksanakan Evaluasi Standar Pelayanan	II
							- Melaksanakan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	II
							- Menyusun Laporan LKjIP	
						2 Keuangan	- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	I, II, III, dan IV
							- Melaksanakan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN	I dan III
							- Menyusun Laporan Keuangan	II dan IV
							- Pengelolaan Perbendaharaan Kantor Wilayah	I, II, III, dan IV
							- Menindaklanjuti Temuan BPK dan Inspektorat Jenderal	IV
							- Melakukan Monitoring Capaian RO pada setiap DIPA di Kanwil Hukum setiap triwulan, termasuk kendala dan alternatif solusi apabila tidak tercapai target RO yang telah ditetapkan	I, II, III, dan IV
							- Sinkronisasi Laporan target CRO dengan Penginputan CRO didalam Sakti	III
						3 Pengelolaan BMN	- Melaksanakan Inventarisasi Aset	I dan II
							- Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2027	IV
							- Menyusun Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	I dan III
						4 Kehumasan, RB dan TI	- Melakukan Peliputan	I, II, III, dan IV
							- Melakukan Publikasi	I, II, III, dan IV
							- Sosialisasi Pembangunan WBK/WBBM pada Saluran Media Komunikasi	I, II, III, dan IV
							- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	I, II, III, dan IV
							- Pembangunan Budaya Anti Korupsi dan Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi	I, II, III, dan IV
							- Menyusun Laporan Manajemen Risiko	I, II, III, dan IV
							- Menyusun Laporan SPIP	I, II, III, dan IV
							- Pelaksanaan Keprotokoleran	I, II, III, dan IV
							- Pelaksanaan teknologi Informasi dan Pengelolaan Data	I, II, III, dan IV
						5 Layanan SDM dan Kepegawaian	- Melaksanakan pemutakhiran data ASN dan pengisian SKP Tahun 2025 pada menu E-Kinerja secara cascading pada SIMPEG HUKUM	I
							- Melaksanakan Pelaporan LHKPN dan LHKASN Tahun 2024	I
							- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPBE	I, II, III, dan IV
							- Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	I, II, III, dan IV
							- Melaksanakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian	I, II, III, dan IV
B. DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM								
1	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	487.281.000	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	- Pelaksanaan Persiapan Fasilitasi Harmonisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	I
							- Melakukan Koordinasi dengan Unit Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota	I, II, III
							- Pelaksanaan Fasilitasi Harmonisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	I, II, III, IV
							- Pemantauan, Evaluasi serta Pelaporan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah	I, II, III, IV
		Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	13 Orang	114.719.000	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah	- Melaksanakan Persiapan Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	I
							- Melaksanakan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	II dan III
							- Pelaporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	IV

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI		TIME LINE RENAKSI (TRIWULAN I/ II / III / IV)
2	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	60.926.000	1 Melaksanakan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah		I, II dan III
						2 Melaksanakan Kegiatan Perumusan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum		III
						3 melaksanakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Analisis dan Evaluasi		IV
			2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	79.579.000	1 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik		I, II dan III
						2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembentukan Peraturan daerah		I, II dan III
3	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	1.113.302.000	1 Melaksanakan Kegiatan Pengelolan dan Pengembangan JDIHN di wilayah		I dan III
						2 Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Anggota JDIH di daerah		II dan IV
						3 Melaksanakan Pengelolaan Perpustakaan Hukum		I dan III
						4 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Perpustakaan Hukum		I dan III
		Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%		Melaksanakan Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1 Tahap Penyidikan/Gugatan/ Pemeriksaan Pendahuluan/Putusan Pengadilan Tingkat I/Upaya Hukum Biasa	I- IV
							2 Tahap Peninjauan Kembali	I- IV
			2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%		Melaksanakan Kegiatan Bantuan Hukum Non-Litigasi	1 Penyuluhan Hukum /Pemberdayaan Masyarakat /Penelitian Hukum/ Mediasi/ Negosiasi/ Pendampingan di luar Pengadilan/ Drafting Dokumen Hukum/ Investigasi Perkara	I- IV
							2 Tahap Peninjauan Kembali	I- IV
		Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan	70%		1 Melaksanakan Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum DSH		I-II
						2 Melaksanakan Pengusulan Desa/Kelurahan Sadar Hukum		II-III
						3 Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi terhadap DSH yang telah di bentuk		I- IV
4	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%	360.082.000	1 Melaksanakan Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		I-III
						2 Melaksanakan Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM di Wilayah		I-III
						3 Pendampingan dan Pemenuhan Data Dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah		I- IV
						4 Melaksanakan Sosialisasi "Diskusi Stategis Kebijakan Hukum"		I- IV
C. DIVISI PELAYANAN HUKUM								
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di	6%	1.655.646.000	1 Melaksanakan Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	- Melaksanakan Layanan Kewarganegaraan	I, II, III, IV
							- Melaksanakan Pelantikan PPNS	
							- Melaksanakan Pelantikan Notaris	
							- Melaksanakan Layanan AHU Lainnya	
							- Melaksanakan Migrasi Data Layanan AHU	
							- Melaksanakan Sosialisasi / Diseminasi / FGD / Rakor / Seminar / Webinar /	
							- Melaksanakan Publikasi, Pameran dan Helpdesk	
							- Melaksanakan Koordinasi	
						2 Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi	- Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi	I, II, III, IV
							- Melaksanakan Laporan Pemantauan dan Evaluasi	
						3 Melaksanakan Penanganan	Melaksanakan Advokasi Perkara terkait produk Layanan AHU di Wilayah	I, II, III, IV
		Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat	90%	534.414.000	Melaksanakan Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	- Melaksanakan Dukungan Kesekretariatan dan Pengawasan MPW	I, II, III, IV
							- Melaksanakan Dukungan Kesekretariatan dan Pengawasan MPD	
							- Melaksanakan Dukungan Kesekretariatan dan Pengawasan MKNW	
2	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	181.874.000	1 Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual		I, II, III, IV
						2 Melaksanakan Pengawasan Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah		
						3 Melaksanakan Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah		
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	1.344.352.000,00	Kegiatan diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Melaksanakan Diseminasi Desain Industri	I, II, III, IV
							2 Melaksanakan Diseminasi Kekayaan Intelektual	
							3 Melaksanakan Agenda RUKI	
							4 Melakukan Penyebarluasan Informasi Kekayaan Intelektual	
			Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	398.445.000	Kegiatan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Melakukan Koordinasi Layanan Kekayaan Intelektual	I, II, III, IV
							2 Melaksanakan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual	

Kepala Kantor Wilayah

Sitna Tedy Marampo
NIP 197807232003121001

KEPALA
PENGAYOMAN
KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT